

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir M, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

....., 2009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

A Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta

....., 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*; Pelita Pustaka; Makassar.

.A.P. Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, cetakan keempat, Mandar Maju, Bandung

Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah*, Bina Cipta, Jakarta

....., 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.

Eli Wuria Dewio, 2014, *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinanya*, Yogyakarta, Buku Pintar.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994

Farida Patittingi, *Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Amanna Gappa, Volume 20 Nomor 3,

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012

H. Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat Dan Permasalahannya)*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

H. Abdullah K, 2013, *Suku Bajo Di Kabupaten Bone*, Luqman al-Hakim Press, Watampone.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

K. Wantjik Saleh, 1997, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.

Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Remaja Rusdakarya, Bandung.

....., 2012, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Marwan Mas, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghina Indonesia, Jakarta.

Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., 2015, *Pengasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Perspektif Hukum Vol 15.

Parlindungan, AP, 1980, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum*, Bina Ilmu, Surabaya.

Poerwardarminta, 1974, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Riduan S, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Sahman, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Soekidjo Notoatmojo, 2005, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Cetakan Ke-1 (Kesatu)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum*, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Prestasi Pustaka, Jakarta.

Urip Santoso, 2015, *Pendaftaran Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

..... 2017, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 1 huruf (d) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

C. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone

<https://www.kompasiana.com/agustinagra/59fd9b2ef33a2d20d465c382/bolehkah-pesisir-dan-laut-disertipikatkan-bpn>

D. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Kepala Lingkungan Kampung Bajo Pada Tanggal 20 Mei 2022

Wawancara dengan Polisi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Sudirman Pada Tanggal 20 Mei 2022

wawancara dengan Kasi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH Cenrana Bone Sitti Aminah Pada Tanggal 1 November 2022

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat suku Bajo Salam Azis Pada Tanggal 1 November 2022

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat suku Bajo Iskandar Rawing Pada Tanggal 1 November 2022

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Arfianty Satyaningsih Pada Tanggal 1 November 2022